

# Proyek Tol Cijago Seksi II Macet

Warga menolak ganti rugi dengan zonasi.

JAKARTA — Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum, Ahmad Gani Ghazali, mengatakan proyek pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II kini terkatung-katung. Pemerintah belum bisa menentukan target penyelesaian proyek tersebut lantaran menghadapi kendala pembebasan lahan. "Belum ada kesepakatan harga dengan pemilik lahan," kata dia kepada Tempo kemarin.

Sejak pengerjaannya diresmikan pada Januari 2012, lahan jalan tol Cijago seksi II yang sudah dibebaskan hanya 46,5 persen dari total kebutuhan lahan seluas 53,01 hektare. Gani mengatakan, selain gajalan harga, surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) belum diperpanjang. SP2LP yang diterbitkan Pemerintah Kota Depok hanya berlaku untuk dua tahun, sehingga

perlu perpanjangan. "Jika perpanjangan belum terbit, pekerjaan belum bisa dilanjutkan," ujarnya.

Proyek tol Cijago sepanjang 14,7 kilometer akan menghubungkan wilayah Jakarta Selatan, Depok, dan Bogor (melalui jalan tol Jagorawi). Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, yakni seksi I sepanjang 3,7 kilometer yang menghubungkan jalan tol Jagorawi-Jalan Raya Bogor; seksi II sepanjang 6 kilometer yang menghubungkan Jalan Raya Bogor-Kukusan, Beji, Depok; serta seksi III sepanjang 4,94 kilometer yang menghubungkan tol seksi II hingga Cinere, Limo, Depok.

Proyek seksi I sudah beroperasi sejak Januari 2012. Sedangkan proyek seksi II dan III ditargetkan rampung pada 2014-2015. Gani mengatakan, dengan hambatan-hambatan tersebut, target pengoperasian Cijago seksi II dan III bakal tertunda. Apalagi, kata dia, pengembang harus membuat jembatan untuk menghu-

bungkan beberapa wilayah di Jalan Raya Bogor yang terpisah aliran sungai.

Di kawasan Kukusan, Beji, Depok, ratusan pemilik dan ahli waris 225 bidang tanah meminta ganti rugi senilai Rp 10 juta per meter persegi atau di luar harga yang ditawarkan Panitia Pembebasan Tanah (P2T). Juru bicara warga, Syamsudin, menuntut pemerintah menetapkan harga secara merata untuk semua jenis lahan. Hal ini sekaligus menandai penolakan warga atas sistem ganti rugi sesuai dengan zonasi yang ditetapkan P2T. "Bukan ganti rugi, melainkan ganti untung mengingat jalan tol adalah jalan komersial," kata dia saat ditemui di kediamannya.

Pembebasan lahan di Kukusan menjadi pengganjal terberat realisasi pembanguan tol Cijago seksi II. Dari dua tahap pembebasan lahan, hanya tahap A yang sudah rampung, yakni dari Jalan Raya Bogor hingga Jalan Margonda Raya. Sedangkan tahap B terhamb

at protes warga. Syamsudin menyatakan musyawarah yang dilakukan warga dan pemerintah belum menemukan titik temu. Mereka menolak tawaran P2T Kota Depok yang membagi lahan berdasarkan enam zona, dengan nilai ganti rugi dari Rp 910 ribu sampai Rp 4,85 juta per meter persegi. "Kami

keberatan karena tak ada dasar hukum yang mengatur zonasi itu," ujarnya.

Namun anggota Tim Pembebasan Tanah Kota Depok, Agus, menyatakan pemerintah sudah tidak bernegosiasi lagi dengan warga. Apalagi sengketa pemerintah dengan warga sudah ditangani oleh Komisi Ombudsman. "Kami sudah transparan dan dianggap adil," katanya.

Menurut Agus, saat ini sudah ada 50 berkas formulir pembebasan lahan yang diambil oleh warga. "Yang mau terima kami proses, yang tidak kita lihat saja perkembangan," ujar dia.

● WISNI ANANDA / LILIAN TITIA (DEPOK)